

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA

Oleh:
MARSIANA LIANCE
NIM. E01107003

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Email :marsianaliance@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi dalam implementasi PKH di Kecamatan Pontianak Utara yaitu pertama, sosialisasi yang belum optimal seperti kurangnya informasi mengenai kebijakan PKH, siapa saja yang berhak memperoleh PKH, biaya apa saja yang menjadi tanggungan PKH, serta apa saja sanksi yang dikenakan apabila tidak memenuhi kewajibannya. Akibat dari kurangnya sosialisasi tersebut masih ada RTSM yang mengalami pemotongan bantuan karena tidak memenuhi kewajibannya. Kedua, sikap kurang peduli petugas instansi terkait pelayanan kesehatan terhadap peserta PKH yang tidak hadir sesuai jadwal yang sudah ditentukan untuk diberi pelayanan atau pembinaan serta kurang disiplin pendamping di UPPKH. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model kebijakan implementasi menurut Brigman dan Davis yaitu sosialisasi, perilaku atau sikap implementor, dan koordinasi antar organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dalam proses implementasi PKH di Kecamatan Pontianak Utara belum dilakukan dengan baik. Hal ini dilihat dari proses penyaluran informasi yang belum efektif dan kejelasan informasi yang diterima oleh masyarakat masih belum jelas terkait PKH. Sikap implementor khususnya pendamping PKH di Kecamatan Pontianak Utara belum sepenuhnya menunjukkan sikap yang baik dalam mendukung pelaksanaan program. Dampak yang dirasakan peserta program adalah semakin meningkatnya penggunaan fasilitas pendidikan dan kesehatan oleh anak usia sekolah, ibu hamil serta anak Balita. Peneliti menyarankan bahwa perlu peningkatan terhadap proses sosialisasi PKH serta perlunya upaya mempercepat tindak lanjut pengaduan yang telah disampaikan, sehingga diharapkan apresiasi peserta terhadap program tersebut menjadi lebih baik lagi.

Kata-kata Kunci: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan

ABSTRACT

Problems that occur in the implementation of the CCT in the District of North Pontianak: first, socialization is not optimal as a lack of information about CCT policy, anyone who is entitled to receive the CCT, whatever the cost to be borne by PKH, as well as any sanctions imposed if it is not fulfilling its obligations. As a result of the lack of socialization is still there RTSM were cut aid because it does not fulfill its obligations. Second, a lack of care attendant health care related institutions against CCT participants who did not attend pre-determined schedule for a given service or coaching and lack of discipline in UPPKH companion. The theory used in this study is a model of policy implementation by Brigman and Davis is socialization, behavior or attitude implementor, and coordination between organizations. The method used is descriptive qualitative research design. Based on the results of the study showed that socialization in the process of implementation of the CCT in the District of North Pontianak has not done well. It is seen from the distribution of information that has not been effective and clarity of the information received by the public is still not clearly associated PKH. PKH companion implementor attitude especially in the District of North Pontianak not fully show a good attitude in supporting the implementation of the program. Perceived impact of program participants is the increasing use of education and health facilities by school-age children, pregnant women and children under five. Researchers suggest that the necessary improvements to the socialization process and the need for efforts to accelerate CCT follow up complaints that have been submitted, so the expected appreciation of the program participants become better again.

Keywords: Implementation of Family Hope Program (PKH), Poverty

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan adalah salah satu upaya penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga yang diluncurkan pemerintah dan telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Dan sebagai imbalannya, RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga, dengan aktor utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program ini, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. PKH sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah *Conditional Cash Transfers* (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program PKH ini “bukan” dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah

tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas (Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, 2012):

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH.
2. Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH.
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, anak di bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Kecamatan Pontianak Utara merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pontianak yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), dan memiliki jumlah yang banyak diantara kabupaten yang lain. Seiring dengan berjalannya implementasi program Keluarga Harapan telah banyak menemui kendala. Kendala tersebut tidak hanya ditemukan di satu daerah atau kota saja, seperti juga yang terjadi di

Kecamatan Pontianak Utara, beberapa permasalahan yang terjadi adalah:

1. Sosialisasi yang belum optimal.

Sosialisasi yang dimaksud disini adalah dalam proses sosialisasi, kurangnya informasi mengenai kebijakan program keluarga harapan seperti siapa saja yang berhak memperoleh PKH, biaya apa saja yang menjadi tanggungan PKH, serta apa saja sanksi yang dikenakan apabila tidak memenuhi kewajibannya. Karena kurangnya sosialisasi itulah mengakibatkan masih ada RTSM yang mengalami pemotongan bantuan karena tidak memenuhi kewajibannya.

2. Sikap kurang peduli petugas instansi terkait serta kurang disiplin pendamping di UPPKH.

Sikap kurang pedulinya petugas instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program, misalnya sikap agak kurang peduli dari pemberi pelayanan kesehatan terhadap peserta PKH yang tidak hadir sesuai jadwal yang sudah ditentukan untuk di beri pelayanan atau pembinaan. Padahal diharapkan para pemberi pelayanan mampu memberikan pelayanan kesehatan baik secara aktif maupun pasif. Kehadiran pendamping di UPPKH juga sangat berperan penting dalam pelaksanaan program.

KAJIAN TEORI

Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip dari Agustino (2008:139) adalah: "Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan esekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mendefinisikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau untuk mengatur proses implementasi".

Menurut Brigman dan Davis (dalam Badjuri dan Yuwono, 2003:26), kesuksesan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh:

1. Sosialisasi. Sosialisasi kebijakan kepada mereka yang akan melaksanakan kebijakan. Hal ini sangat penting dilakukan apalagi kepada pelaksana kebijakan pada tingkat bawah (street level bureaucracy) harus diberikan informasi yang menyeluruh dan utuh mengenai kebijakan publik yang diambil karena pelaksanaan pada tingkat bawah ini merupakan ujung tombak implementasi kebijakan. Keberhasilan sosialisasi dalam proses implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi antar pelaksana atau implementor. Menurut Rogers dan D. Lawrance Kincaid: "Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.
2. Perilaku dan sikap implementor dalam implementasi kebijakan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berhubungan erat dengan

pelayanan. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan diperlukan suatu proses untuk menyusun rencana, mengkoordinasi, menyelesaikan aktifitas-aktifitas dalam bentuk pelayanan demi tercapainya tujuan. Serangkaian aktifitas itu terjadi sebagai akibat adanya interaksi yang dapat dikatakan pelayanan.

3. Koordinasi juga merupakan satu diantara aspek yang terpenting dalam sebuah implementasi kebijakan. Menurut Yuwono dan Badjuri (2003: 26) koordinasi dalam implementasi kebijakan dapat berjalan baik jika:
 - a. Adanya kesesuaian yang jelas antara kebijakan yang diambil dengan keputusan pelaksanaannya, yang memerlukan dukungan komunikasi antar implementor.
 - b. Perlakuan yang sama terhadap semua lembaga atau pihak yang terlibat, perilaku yang baik (appropriate) dari pegawai yang mengimplementasikan kebijakan tersebut.
 - c. Adanya penghargaan yang kuat dari para implementor terhadap prosedur dan proses yang mesti dilalui dalam implementasi kebijakan.
 - d. Adanya kejelasan tentang kebijakan dan tindakan pemerintah tentang apa yang ingin dan akan dilakukan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian deskriptif yaitu pencarian fakta dan interpretasi yang tepat dan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Subjek dalam penelitian ini yaitu Pendamping PKH, Camat serta masyarakat penerima PKH. Dengan fokus penelitian menggunakan teori Brigman dan Davis terdiri dari sosialisasi, perilaku dan sikap implementor dan koordinasi. Teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Teknik Wawancara
Teknik wawancara ini dimaksudkan bahwa dalam kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan informan guna memperoleh informasi yang diinginkan.
- b. Teknik Observasi
Teknik observasi ini dimaksudkan bahwa dalam pengumpulan data peneliti melakukan pengamatan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi objek peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan valid.
- c. Teknik Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari, mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat ataupun catatan serta buku yang berisi laporan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti peraturan, surat keputusan, serta surat edaran yang dianggap relevan dengan objek peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi Pelaksanaan PKH

Sosialisasi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya member pemahaman tentang suatu kebijakan, peraturan, atau program yang akan diterapkan atau diberlakukan kepada pihak lain. Dengan kata lain sosialisasi diharapkan dapat member pemahaman kepada pihak lain untuk mengikuti kebijakan, peraturan, atau program yang diberlakukan.

Dalam proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pontianak Utara, pelaksanaan sosialisasi sangat jarang dilakukan kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat mengenai PKH sangat minim, bahkan banyak diantaranya sama sekali tidak mengetahui tentang PKH. Proses sosialisasi tidak hanya dilakukan secara langsung (tatap muka), tetapi juga dapat menggunakan perantara media. Media yang dimaksud adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media yang digunakan dalam sosialisasi ini dapat berupa televisi, radio, film, surat kabar, atau media komunikasi format kecil seperti poster, selebaran, brosur, stiker, dan pamflet.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan informan diatas yang mengatakan bahwa tidak adanya pengumuman-pengumuman terkait PKH di kecamatan menjadi salah satu kendala masyarakat untuk mengetahui dan memahami PKH secara mendalam. Jadi media komunikasi dalam format kecil terkait PKH akan sangat besar manfaatnya bagi pengetahuan masyarakat mengenai

PKH itu sendiri. Dalam observasi yang peneliti lakukan di kecamatan Pontianak Utara, peneliti tidak menemukan adanya pengumuman terkait tentang PKH.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sumardi selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara mengatakan bahwa terkait persoalan sosialisasi PKH di Kecamatan Pontianak Utara, pihak kecamatan tidak turut serta dalam pemberian sosialisasi karena pihak kecamatan disini hanya sebagai Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) saja. Mengenai kegiatan sosialisasi, itu merupakan tugas dari pihak pendamping PKH yang bekerja sama dengan UPPKH Kota dan Dinas Sosial.

Agar tujuan dari implementasi PKH dapat berhasil dan bermanfaat, diperlukan pemberian sosialisasi yang tepat, akurat serta optimal kepada masyarakat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Keterlibatan pihak-pihak tersebut bertujuan agar masyarakat miskin mengetahui seperti apa kebijakan dari pemerintah tersebut, apa yang menjadi tujuan, visi serta misi diberlakukannya program tersebut, bagaimana tata cara menggunakan program ini, kriteria masyarakat yang bagaimana yang dapat program ini, serta hak kewajiban dan sanksi dari program tersebut. Ini sangat penting mengingat rata-rata RTSM tersebut memiliki keterbatasan dalam pendidikan dan pengetahuan, sehingga tanpa adanya pemberian informasi berupa sosialisasi maka suatu kebijakan atau program tidak

dapat berjalan dengan baik dan memiliki kemungkinan dalam prakteknya akan menemui berbagai kendala.

Dalam wawancara dengan Ani (30) salah satu warga miskin yang dapat PKH, mengatakan bahwa :

“Keluarga saya memang baru dapat PKH dari tahun 2012, tapi sampai sekarang ndak pernah ada sosialisasi untuk diberi informasi tentang PKH oleh petugas PKH. Tahu kewajiban yang harus dilaksanakan saja dari ibu rumah tangga lain yang dapat bantuan juga. Kalau uang bantuan udah cair di kantor POS biasanya dikirimkan SMS atau ndak dikasi tau sama kawan yang dapat juga kalau bantuan udah cair.”

Berdasarkan pernyataan informan di atas diketahui bahwa sosialisasi dalam implementasi PKH belum dilakukan secara maksimal, terlihat dari belum dilakukannya upaya terkait penyampaian informasi mengenai PKH baik sesama implementor maupun dari implementor kepada kelompok sasaran kebijakan atau masyarakat. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat ini dapat dilihat dari masih kurangnya informasi atau pemahaman masyarakat penerima program maupun yang tidak menerima program mengenai apa itu PKH dan apa yang menjadi hak serta kewajibannya.

Dengan demikian apabila kita melihat kembali proses sosialisasi program keluarga harapan di kecamatan pontianak utara di atas, maka proses sosialisasi sejauh ini belum dilaksanakan dengan baik atau

belum efektif. Hal ini bisa dilihat dari proses penyaluran informasi mengenai PKH yang belum diupayakan secara maksimal serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang mengakibatkan kurang pahaman masyarakat terhadap tujuan dilak-sanakannya program. Jadi sosialisasi Pro-program Keluarga Harapan merupakan tahapan yang dinilai sangat penting karena hal ini berkaitan langsung dengan pemahaman masyarakat sebagai penerima kebijakan ter-sebut. Selain bertujuan untuk menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut, proses sosialisasi juga akan membantu masyarakat untuk memahami tentang mekanisme penyaluran bantuan, kewajiban serta hak dari penerima bantuan, serta kriteria alokasi PKH itu seperti apa. Hal ini sangat penting untuk mencegah ketimpangan atau kerawanan sosial yang diakibatkan dari kurang pahaman di masyarakat secara dini.

2. Sikap Implementor Dalam Implementasi PKH

Salah satu faktor yang mendukung efektivitas implementasi suatu kebijakan atau program adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan isi kebijakan yang akan mereka implementasikan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, akan tetapi bila pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka dalam pengimplementasian kebijakan atau program akan terdapat masalah yang mengakibatkan ketidakefektifan implementasi kebijakan. Sikap dapat

didefinisikan sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu rangsangan yang timbul dari seseorang atau dari suatu situasi.

Sikap atau perilaku serta komitmen dari pendamping juga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Tanpa adanya sikap dan komitmen yang tinggi dari pelaksananya, maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Asdiana selaku pendamping PKH di Kecamatan Pontianak Utara mengatakan bahwa:

“saya sangat mendukung sekali PKH ini. Sebagai pendamping rasanya kami melakukan tugas yang menjadi tanggung jawab kami dengan baik agar program ini dapat berjalan dengan baik dan sukses seperti yang menjadi tujuan dari PKH itu sendiri. Untuk pendamping PKH di Kecamatan Pontianak Utara ini kami terdiri dari empat orang yang masing-masing mendampingi satu keluarga jadi kita sebagai pendamping memiliki beban kerja yang sama.”

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu penerima PKH:

“...waktu pengambilan uang di kantor POS, ada kok pendamping yang ngawas proses berjalannya pengambilan uang. Jadi saya rasa sikapnya sudah cukup baik”.

Dari wawancara di atas dapat diketahui perilaku pendamping PKH sudah cukup mendukung keberhasilan PKH ini dilihat dari keikutsertaan

mereka dalam pengawasan proses pengambilan bantuan di kantor POS.

Dalam menjalankan Program Ke-luarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pontianak Utara, komitmen dari pendamping PKH dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dengan besarnya harapan dari pendamping untuk mensukseskan tujuan dari program keluarga harapan ini. Tujuan dari program keluarga harapan ini yaitu mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM terutama pada masyarakat miskin, merubah perilaku RTSM yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, serta meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi RTSM.

Dalam wawancara dengan pendamping PKH, mereka menambahkan bahwa terkait bentuk nyata dari tugas pendamping kecamatan yaitu salah satunya pada waktu pengambilan bantuan PKH, pendamping PKH kecamatan Pontianak Utara yang terdiri dari empat orang yang masing-masing mendampingi satu keluarga akan secara bergantian turun ke kantor POS untuk melakukan pengawasan proses pengambilan bantuan bagi RTSM sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dari hasil penelitian dan observasi langsung peneliti ke Kecamatan Pontianak Utara yang merupakan UPPKH tingkat kecamatan, peneliti menemukan bahwa pendamping PKH sangat jarang berada di kecamatan sehingga hal ini menimbulkan pemikiran dari peneliti

bahwa pendamping PKH kurang aktif dalam pelaksanaan program di UPPKH kecamatan. Menurut Bu Asdiana salah satu pendamping PKH ke-camatan Pontianak Utara mengatakan jaranganya pendamping PKH di kecamatan Pontianak Utara dikarenakan mereka lebih sering terjun langsung ke lapangan untuk bertemu atau mengawasi kegiatan para penerima PKH.

Sedangkan berdasarkan hasil wa-wancara dengan salah satu masyarakat yang menerima PKH mengatakan bahwa merka belum pernah beretemu langsung ataupun kenal dengan pendamping PKH untuk kecamatan Pontianak Utara ini. Mereka mengaku tahu menjadi penerima PKH ini karena dikirim surat dan kartu peserta PKH, yang nantinya kartu PKH ini akan di-gunakan untuk pengambilan bantuan di kantor POS.

Dari keterangan diatas menunjukan bahwa pendamping PKH belum sepenuhnya menunjukan sikap yang baik dalam mendukung pelaksanaan program ini. Sikap pendamping perlu ditingkatkan terutama pada bagian-bagian tertentu seperti pada kedisiplinan dalam pendampingan dan kunjungan terhadap masyarakat penerima program. Keaktifan pendamping di UPPKH juga perlu ditingkatkan, sehingga segala bentuk pengaduan dari masyarakat dapat langsung ditindaklanjuti. Para pendamping PKH diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat langsung turun ke lapangan untuk mendata masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sesuai dengan

kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan dengan seobjektif mungkin melihat kondisi yang ada di masyarakat. Sehingga hasil pendataan akan menghasilkan data yang akurat.

3. Koordinasi Antar Organisasi Dalam Pelaksanaan PKH

Koordinasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam setiap kegiatan organisasi dan merupakan salah satu aspek terpenting di dalam suatu imple-mentasi kebijakan publik. Koordinasi dibutuhkan dalam setiap kebijakan untuk menciptakan suatu keselarasan, keserasian, keterpaduan, dan kesatuan tindakan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi merupakan suatu kerja sama antara badan atau aparat dari pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Bentuk dari koordinasi ini berupa saling pengertian, saling mengisi, saling membantu dan melengkapi.

Koordinasi dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Pontianak Utara adalah koordinasi yang dilakukan antara pihak ke-camatan, pendamping PKH, pihak PT POS, lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan serta masyarakat selaku penerima program keluarga harapan. Adapun yang menjadi koordinator dalam pelaksa-naan PKH di kecamatan Pontianak Utara ini yaitu Pendamping PKH di UPPKH kecamatan, kantor POS, kecamatan, lembaga lain diluar struktur yaitu lembaga pelayanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu, Poliklinik/BPM) dan pelayanan Pendidikan (sekolah) yang terdapat di

kecamatan Pontianak Utara. Sedangkan yang dikoor-dinir disini yaitu RTSM yang menerima PKH.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pendamping PKH menga-takan bahwa berkaitan dengan bentuk koordinasi yang mereka lakukan dengan pihak Kantor POS yaitu dalam hal pene-tapan jadwal pembagian bantuan PKH bagi empat kelurahan. Pihak pendamping akan mengadakan rapat dengan pihak kantor POS yang diadakan di Kantor POS Siantan.

Berikut penuturan dari pendamping PKH:

“Kalau sudah ada jadwal pembagian bantuan dari pusat, biasanya kami akan mengadakan rapat dengan pihak kantor POS untuk menentukan jadwal peng-ambilan bantuan dari masing-masing kelurahan. Biasanya jadwal pengambil-an untuk empat kelurahan di Pontianak Utara ini ditetapkan selama duaminggu.”

Dari penjelasan diatas, dapat di-simpulkan jika koordinasi yang dilakukan pihak pendamping PKH beserta pihak kantor POS berlangsung dengan baik, namun didalam mengimplementasikan PKH ini masih memerlukan koordinasi yang lebih efektif lagi dengan pihak terkait lainnya agar mencapai suatu kesempurnaan didalam men-jalankan dan mensukseskan implementasi kebijakan ini.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sosialisasi dalam proses implementasi Program Keluarga Harapan di Keca-matan Pontianak Utara belum dilakukan dengan baik. Hal ini dilihat dari proses penyaluran informasi yang belum efektif dan kejelasan informasi yang diterima oleh masyarakat masih belum jelas serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai PKH. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan memahami mengenai apa itu PKH. Khususnya RTSM penerima program masih belum sepenuhnya me-mahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya.
2. Sikap implementor khususnya pendam-ping PKH di Kecamatan Pontianak Utara belum sepenuhnya menunjukan sikap yang baik dalam mendukung pe-laksanaan program, meskipun pendam-ping lumayan cukup berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sikap pendamping perlu ditingkatkan terutama pada bagian-bagian tertentu seperti pada keaktifan di UPPKH, kedisiplinan dalam pendampingan dan kunjungan terhadap masyarakat pe-nerima program.
3. Koordinasi yang terjadi antara pen-damping dan pihak kantor POS dan kecamatan sudah bejalan dengan baik, namun koordinasi antar pihak ini perlu ditingkatkan lagi agar implementasi PKH di Kecamatan Pontianak Utara dapat benar-benar efektif. Dengan saling

mengadakan koordinasi antar organisasi, maka kejelasan dari penyajian informasi maupun data tentang program-program kerja, pelaksanaan maupun perkembangan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka implementasi PKH dapat diketahui.

B. SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

1. Pelaksana khususnya pendamping diha-rapkan dapat meningkatkan sosialisasi yang dilakukan yaitu secara utuh, ter-padu, dan berkelanjutan tentang segala bentuk informasi yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), agar RTSM lebih paham mengenai PKH baik itu kewajiban dan hak dari penerima bantuan serta sanksi terhadap penerima yang tidak memenuhi kewajibannya.
2. Keaktifan dan kehadiran pendamping diUnit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) perlu ditingkatkan agar hambatan, keluhan dan masalah dari RTSM penerima program dapat di-dengar dan diketahui sehingga hamba-tan, keluhan dan masalah tersebut dapat langsung dikomunikasikan ke implemtor level atas untuk ditindaklanjuti.
3. Dalam koordinasi yang dilakukan antar pendamping PKH, kantor POS, pihak kecamatan serta pihak pendukung lain perlu ditingkatkan lagi dengan mengada-kan

pertemuan-pertemuan untuk mem-bahas hal-hal yang terkait pelaksanaan PKH dan sebaiknya peran masya-rakat juga perlu dilibatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasarKebijakanPublik*. Bandung: Alfabeta.
- Badjuri dan Yuwono Teguh. 2000. *Kebijakan Publik, Konsep Dan Strategi*. Semarang: UNDIP
- BukuSakupendamping PKH. 2009. DirektoratJaminanKesehatanSosi alDirektoratJenderalBantuan danJ aminanSosialDepartemenSosial RI. Jakarta.
- Dunn, William N. 2000. *PengantarAnalisaKebijakanPubl ikEdisi II*. Yogyakarta: Gajahmada University press.
- Fitriani, NMN.2012. *Evaluasi Implementasi Program KeluargaHarapan (PKH) di KecamatanMajasariKabupatenP andeglang (StudiKasusTahap III Tahun 2010)*. Skripsi. FakultasIlmuSosialdanIlmuPoliti kUniversitas Sultan AgungTritayasa.
- Islamy, Irfan. 1996.*KebijakanPublik*. Jakarta: BumiAksara.
- Moleong Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya.
- Subarsono, AG. 2005. *AnalisisKebijakanPublik*. PustakaPelajar: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *MemahamiPenelitianKualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Wahab, Solichin Abdul. 2005.
Analisis Kebijakan. Jakarta:
Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 1992. *Proses
Pembuatan Kebijakan Publik*.
Yogyakarta:
Universitas Gajahmada.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi presiden Republik Indonesia
No. 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan Yang Berkeadilan

Sumber Lainnya

Admin Antarakalbar. 2012. *RTSM Di
Kota Pontianak 2.000 Kepala
Keluarga*.
<http://www.antarakalbar.com/berita/303787/rtsm-di-kota-pontianak-2000-kepala-keluarga>. Diakses 6 Maret 2014.

Eka Prastia Pradikta. *Implementasi
Program Keluarga Harapan (PKH)
Bidang Kesehatan Di
Desa Pulo Kecamatan Jombang Kabupat
en Jombang*.
<http://ejournal.unesa.ac.id/jurnal/publika/abstrak/3963/implementasi-program-keluarga-harapan-pkh-bidang-kesehatan-di-desa-pulo-kecamatan-jombang-kabupaten-jombang>. Diakses 11 Mei 2014.

Ijoen. 2011. *Kehidupan Masyarakat
Miskin (Life of Poor Citizen)*.
<http://masyarakatmiskin.blogspot.com/2011/02/pengertian-masyarakat-miskin.html>. Diakses 3 Agustus 2012



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Marsiana Liance
NIM / Periode lulus : E01107003
Fakultas/Jurusan : ISIP / IA
E-mail address/HP : marsianaliance@yahoo.com / 081250206093

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pontianak Utara

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal ... 17-2-2015

Dr. Arif M. AB
NIP. 197105021497021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 17-2-2015

(Marsiana Liance)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).